

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Syarifuddin Natabaya. "*Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*". dalam Refly Harun. 2004. *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta.

Aminuddin Ilmar. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana. Jakarta.
Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.

Firmansyah Arifin, *et.al.* 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

F.A.M, Stroink. 2006. *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, Refika Aditama. Bandung.

Henry Cambpell, 1990. *Black's Law Dictionary*, West Publishing.

Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Konstitusi Press. Jakarta.

_____. 2005. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga negara*. Konstitusi Press. Jakarta.

_____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta.

Kustoro Budiarta, *et.al.* 2020. *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis. Medan.

P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rinneka Cipta. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke-13*. Kencana. Surabaya.

Philipus M. Hadjon. 2010. *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Yusri munaf. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.

_____. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.

Zainuddin. 2020. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Skripsi

Novi Nour Hidayati. 2022. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penanggulangan Kejahatan Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

Topan Syahid Cahyadin. 2019. "Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Menangani Kejahatan Digital (Cyber Crime) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung.

Jurnal

Anik Setyowati dan Muhammad Machbub Rochman. "Penerapan Manajemen Penanganan Keluhan Peserta Pelatihan (Studi Kasus di Pusdiklat Badan Siber dan Sandi Negara)". *Cendekia Niaga*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Volume 5 Nomor 2. Desember 2021.

Dinoroy Aritonang. "Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Implementation of Internal and Functional Controlling on Implementation of Local Government)". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Politeknik STIA LAN Bandung. Volume 11 Nomor 3. Desember 2014.

Eka Merdekawati Djafar, "Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3 Nopember 2014.

Hezkiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha. "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data". *Jurnal Kewarganegaraan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Volume 6 Nomor 1. Juni 2022,

Hidayat Chusnul Chotimah. "Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara [*Cyber Security Governance and Indonesian Cyber Diplomacy by National Cyber and Encryption Agency*]". *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Volume 10 Nomor 2. November 2019,

Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan mandat", *Khazanah Hukum*, UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 2. Nomor 2 November 2020.

Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan mandat",

Khazanah Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 2, Nomor 2 November 2020.

Nelis Hernawanti. "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan". *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*. Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut. Volume 2 Nomor 2. Agustus 2020.

Philipus M. Hadjon, Wewenang, *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.5 & 6 tahun XII, Sep-Des,1997.

Siti Suwadah, Sitti Aidah Azis, dan Asnawati. "Sastra Digital Wujudkan Ruang Kreatif bagi Generasi Millneal dalam Mengembangkan Keterampilan Menulis". *In Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*. Universitas Muhammadiyah Malang. Volume 5 Nomor 1. Desember 2021.

V. K. Siswanto, *et.al.* "Best Practice of Start Up in Indonesia". *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Science. Volume 562 Nomor 1. Agustus 2020.

Yoga Maulana Yusuf, *et.al.* "Implementasi Program Corporate Social Responsibility oleh Perusahaan Unicorn di Indonesia". *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Universitas Padjajaran. Volume 6 Nomor 3. Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4843.

Undang-Undang Nomor Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Lembaran Negara Nomor 277 Tahun 2017.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021.

Sumber Internet

KOMINFO, “Tumpang tindih tugas Badan Siber dengan Lembaga Lain”, (Berita Online), diakses di makassar pada tanggal 04 juli 2023. (https://www.kominfo.go.id/content/detail/12355/tumpang-tindih-tugas-badan-siber-dengan-lembaga-lain/0/sorotan_media)

_____, “Menkominfo Soal Organisasi Badan Siber: Kami Ingin Lebih Cepat!”, Diakses pada tanggal 16 Juni 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/9996/menkominfo-soal-organisasi-badan-siber-kami-ingin-lebih-cepat/0/sorotan_media

Kompas, “Pakar sebut data peduli lindungi yang dibocorkan bjorka valid”. diakses di makassar pada tanggal 6 juni 2023 pukul 23.25 Wita. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/17/05150031/pakar-sebut-data-pedulilindungi-yang-dibocorkan-bjorka-valid>

_____,” Bjorka Diduga Bocorkan 44 Juta Data Pengguna

MyPertamina, Manajemen: Kami Sedang Investigasi”. diakses di makassar pada hari selasa tanggal 6 juni 2023 pukul 23.40 Wita, <https://money.kompas.com/read/2022/11/10/191834326/bjorka-diduga-bocorkan-44-juta-data-pengguna-mypertamina-manajemen-kami-sedang>,

Otoritas Jasa Keuangan, “Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan”, Berita dan Kegiatan, di akses pada tanggal 26 Mei 2023, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan.aspx>,

Liputan 6, “15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor, OJK Diminta Investigasi Akar Masalah” Diakses di makassar pada tanggal 9 agustus 2023 pukul 00.44 Wita

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5285728/15-juta-data-nasabah-bsi-diduga-bocor-ojk-diminta-investigasi-akar-masalah>

_____, “Pengguna Lazada jadi korban Order Fiktif Rp 22 Juta”.

Diakses di makassar pada tanggal 09 agustus 00.14 Wita, <https://www.liputan6.com/amp/3236775/pengguna-lazada-jadi-korban-order-fiktif-rp-22-juta>,